

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PENGAWASAN KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA  
LHOKSEUMAWE**

Dea Juliani<sup>1</sup>, Hendra Raza<sup>2</sup>,

Nur Afni Yunita<sup>3</sup>, Ikhyanuddin<sup>4</sup>

[dea.200420020@unimal.ac.id](mailto:dea.200420020@unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [hendra@unimal.ac.id](mailto:hendra@unimal.ac.id)<sup>2</sup>, [nurafni.yunita@unimal.ac.id](mailto:nurafni.yunita@unimal.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ikhyanuddin@unimal.ac.id](mailto:ikhyanuddin@unimal.ac.id)<sup>4</sup>

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe  
Kampus Bukit Indah Blang Pulo, Kec. Muara Satu-Lhokseumawe*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pengawasan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating pada organisasi perangkat daerah kota lhokseumawe. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran terdiri dari 33 organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Lhokseumawe. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposiv sampling dan diperoleh sebanyak 99 orang responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket kuesioner. Metode pengelolaan data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengawasan kualitas laporan keuangan mampu memoderating variabel standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata kunci:** *Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan*

**Abstract**

*This study aims to determine the influence of government accounting standards and on the accountability of the performance of government agencies with the supervision of the quality of financial statements as a moderate variable in the regional apparatus organization of the city of Lhokseumawe. The population in this study are employees who carry out financial functions that are directly involved in the preparation, implementation and accountability of the budget consists of 33 regional apparatus organizations in Lhokseumawe City. Sampling in this study used purposiv sampling and obtained as many as 99 respondents. This research is a quantitative research with primary data sources. The data collection technique in this study is to use questionnaire questionnaires. The data management method used is multiple linear regression analysis using SPSS 29. The results of this study show that government accounting standards have a significant effect on the accountability of the performance of government agencies, the quality supervision of financial reports is able to moderate the variables of government accounting standards on the accountability of the performance of government agencies.*

**Keywords:** *Government Accounting Standards, Government Agency Performance Accountability, Financial Report Quality Supervision*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Standar tersebut membantu dalam menyusun, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan secara sistematis dan transparan, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Instansi pemerintah harus melaksanakan manajemen keuangan dan bertanggung jawab atas eksekusi keuangannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang berasal dari perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam konteks pertanggungjawaban tersebut, penting untuk menerapkan pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan usaha reformasi dan pengembangan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang akuntansi pemerintahan, guna membentuk suatu sistem yang sesuai. Keberadaan laporan keuangan, baik dari tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat dikelola secara optimal untuk mengatur dana publik dengan transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (Mardiasmo, 2004).

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: 1. Opini atas Laporan Keuangan: Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, antara lain yaitu: a. Penyusunan Perkiraan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 Tidak Realistis; b. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Sebesar Rp. 915.195.127,23 atas 30 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPK (LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe).

Fenomena yang diakui oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe bahwa laporan ini dianggap sebagai bagian dari upaya mereka untuk merapikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan, karena kurangnya kualitas laporan keuangan banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan sistem keuangan termasuk juga bagaimana efektifitas penggunaan anggaran yang ada di APBK Pemerintah Kota Lhokseumawe guna memperbaiki Laporan Keuangan Daerah Pemerintah (LKDP) agar menjadi lebih akuntabel. Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan praktik akuntansi yang efektif oleh lembaga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Lhokseumawe masih perlu dibenahi dan dirapikan sesuai Standar yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menginvestigasi hal ini, guna memverifikasi kebenarannya dan sebagai dasar teoritis bagi peneliti untuk menemukan kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana penelitian yang dilakukan oleh (Darma, 2019) menunjukkan bahwa variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1) dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurashatunisa et. al, 2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian yang dilakukan

(Purnama dan Tamsir, 2023) menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memasukkan variabel moderating yang menjadikan variabel penguat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Dalam laporan keuangan yang berkualitas, memiliki arti bahwa kepala daerah telah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya dalam hal pelaksanaan mengelola organisasinya (Riandani, 2017).

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya (Reyhan, 2017).

Menurut Permadi (2013) SAP adalah suatu standar penyusunan laporan keuangan untuk lingkup pemerintahan yang di susun sesuai dengan prinsip- prinsip akuntansi sebagai pedoman dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bagaimana pengawasan kualitas laporan keuangan dapat memoderating standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori

#### Teori Stewardship

Teori stewardship ini sejalan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah sebagai steward yang mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik, pemerintah sebagai steward memiliki tugas melayani publik dan juga mensejahterakan masyarakat (Indrayani & Widiastuti, 2020). Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, serta mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

#### Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakann seseorang ataupun organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahmadoni & Erwandi, 2018). Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan

sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif (Zeyn, 2011).

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak legislatif, yudikatif, dan masyarakat dalam lingkup akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah (Halim, 2013).

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan good governance. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan lebih sistematis menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di Indonesia, serta tantangan di era globalisasi sekarang ini yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya akuntansi pemerintahan (Erwinton, 2013).

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah disini bermakna sebagai perwujudan suatu instansi yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasinya sesuai rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama suatu periode tertentu. Untuk mengimplementasikan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik memerlukan suatu sistem yang efektif dan saling terkoordinasi serta adanya aturan yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah.

Penerapan system pengukuran kinerja pemerintah telah diatur dalam inpres No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan dari Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan alat pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang akan dinilai secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan (Arjuna dan Putri, 2019).

### **Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (stakeholder) tentang kondisi keuangan pemerintah.

Dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan merujuk pada tingkat kehandalan, relevansi, dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan manajemen, untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data finansial yang akurat. Laporan keuangan yang berkualitas juga mencerminkan transparansi perusahaan dalam menyajikan informasi, menjelaskan secara jelas kondisi keuangan perusahaan, dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

### Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan pemerintahan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tepat waktu dan memenuhi standar akuntansi pemerintah yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasution, 2019). Standar akuntansi pemerintah memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebab adanya rangkaian-rangkaian prosedur yang tersusun dalam rangka mempertanggungjawabkan anggaran. Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintah sangat mempengaruhi perwujudan tingkat pencapaian kerja yang telah tersistematis dalam sebuah instansi.

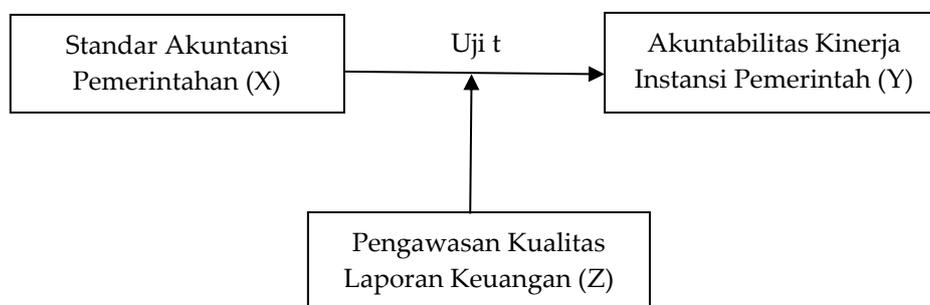
Hasil penelitian Nasution (2019) yang menguji implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa secara parsial standar akuntansi pemerintah mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai hasil penelitian Ajhar et al, (2015), dengan adanya standar akuntansi pemerintah mengakibatkan penyajian laporan keuangan pemerintah lebih akuntabel, sehingga berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Memoderating Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Santoso (2008) bahwa secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas. Dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas maka berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Jannaini (2012) menyimpulkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

### METODE

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di kota Lhokseumawe. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 33 instansi/dinas yang meliputi 4 Kecamatan, 8 Lembaga Teknis Daerah, 5 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD dan 15 Dinas Daerah. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu purposive sampling dimana penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Sampel pada penelitian semua OPD yang berjumlah 33 instansi. Dari setiap instansi diambil 3 responden yaitu, Bendahara, Sekretaris dan Kepala Sub Bidang Keuangan. Kriteria dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing OPD. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 99 responden.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner disebar dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan mendatangi tempat responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini data primer yaitu tanggapan yang dijawab langsung oleh subjek penelitian yaitu dengan menggunakan kuesioner.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner (angket). Kuesioner ini terdiri dari daftar pertanyaan, kemudian responden diharap untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dengan teknik pengukuran menggunakan skala likert.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah atau metode agar mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga, data tersebut menjadi mudah agar dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisa data tersebut berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan analisis kuantitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan komputer melalui program software statistical package for science (SPSS).

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisa data untuk menjelaskan data secara umum atau generalisasi, dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean),

dan standar deviasi (Sugiyono, 2017). Uji statistic deskriptif ini dilakukan agar menjelaskan gambaran tentang demografi responden penelitian serta deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner.

### **Uji Kualitas Data**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji instrumen yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi nilai ketepatan atau validitas dari instrumen kuesioner yang digunakan. Metode uji validitas yang digunakan adalah indikasi nilai r-hitung. Apabila nilai r-hitung lebih tinggi dari r-tabel maka instrumen yang digunakan memenuhi unsur validitas sehingga tepat digunakan untuk mencari data studi dari responden. Apabila nilai r-hitung ternyata lebih rendah dari r-tabel maka instrumen yang digunakan dinyatakan tidak valid serta belum mampu memenuhi unsur validitas (Ghozali, 2014).

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu skor instrumen pengukur. Suatu kuesioner adalah nilai cronbach alpha yang diperoleh melalui perhitungan statistik. Nilai cronbach alpha minimum yang dapat diterima adalah 0,60 dan menjadi reliable (Ghozali, 2018). Hal ini berarti suatu kuesioner dinyatakan handal apabila nilai cronbach alpha yang diperoleh berada diatas 0,60.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan agar mengetahui bagaimana hubungan antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi yang baik sebaiknya jangan memiliki korelasi atau hubungan antara variabel bebas. Menurut Ghozali (2018) pengujian multikolinearitas bisa dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF) yaitu Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dan jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolonieritas.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Metode uji heterokedastisitas yang digunakan adalah uji heterokedastisitas Glestjer. Apabila nilai signifikansi uji Glestjer lebih dari 0,05 maka data-data penelitian bebas dari permasalahan heterokedastisitas atau perbedaan varian residual data. Apabila nilai signifikansi uji Glestjer kurang dari 0,05 maka di dalam data-data penelitian terjadi permasalahan heterokedastisitas atau perbedaan varian residual data.

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas dapat dideteksi dengan dua cara yaitu: analisis grafik dan analisis statistik uji kolmogorov-smirnov. Metode uji normalitas yang digunakan adalah uji normalitas Kolmogrov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi hasil uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,10 maka data dinyatakan terdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi hasil uji Kolmogorov-Sminov kurang dari 0,10 maka data dinyatakan tidak normal (Ghozali, 2018).

### **Pengujian Moderated Regression Analysis (MRA)**

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variable independen) (Ghozali, 2018).

### **Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2018) :

1. Jika nilai signifikansi uji  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikansi uji  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua variabel yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghazali (2018).

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe pada Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Lhokseumawe adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah kota dalam berbagai bidang. Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe terdapat 33 OPD yang terdiri dari 4 Kecamatan, 8 Lembaga Teknis Daerah, 5 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD dan 15 Dinas Daerah. Setiap OPD memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam mendukung pelayanan publik dan pengelolaan administrasi di Kota Lhokseumawe. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah setempat.

Waktu penyebaran dan pengembalian kuesioner dilakukan dalam waktu dua minggu lebih yaitu pada 28 Mei sampai 13 Juni 2024. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 99 kuesioner, adapun kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti adalah sebanyak 94 kuesioner dan data yang siap diolah yaitu sebanyak 94.

### Karakteristik Responden

#### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki – Laki	50	53,2 %
2.	Perempuan	44	46,8 %
	<b>Jumlah</b>	94	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 29

#### Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.3****Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1.	< 25 Tahun	1	1,1 %
2.	25 - 35 Tahun	7	7,4 %
3.	36 - 45 Tahun	40	42,6 %
4.	>45 Tahun	46	48,9 %
<b>Jumlah</b>		94	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 29

**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan****Tabel 4.4****Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	D3	15	16 %
2.	S1	58	61,7 %
3.	S2	17	18,1 %
4.	S3	4	4,3 %
<b>Jumlah</b>		94	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 29

**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja****Tabel 4.5****Lama Bekerja**

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase %
1.	<5 Tahun	10	10,6 %
2.	5 -10 tahun	6	6,4 %
3.	>10 Tahun	78	83 %
<b>Jumlah</b>		94	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 29

**Teknik Analisis Data****Analisis Statistik Deskriptif**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. Variabel dependen merupakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel independen adalah standar akuntansi pemerintah. Variabel moderating adalah pengawasan kualitas laporan keuangan Jumlah sampel sebanyak 94 responden sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 4.6****Statistik Deskriptif Variabel**

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Standar	Akuntansi	94	40	60	52,40	5,119
Pemerintahan	Akuntabilitas	94	36	50	43,61	4,271
	Kinerja					
	Instansi Pemerintah	94	14	20	17,76	1,676
	Pengawasan					
	Kualitas					
	Laporan Keuangan	94				
	Valid N (listwise)					

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 26

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besar (df) = 94-2 maka didapat angka 92, dan didapat r tabel 0,2028. Adapun hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.7

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X)	X.1	0,718	0,202	Valid
	X.2	0,764		Valid
	X.3	0,742		Valid
	X.4	0,681		Valid
	X.5	0,662		Valid
	X.6	0,686		Valid
	X.7	0,724		Valid
	X.8	0,770		Valid
	X.9	0,779		Valid
	X.10	0,685		Valid
	X.11	0,763		Valid
	X.12	0,730		Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y.1	0,795	0,202	Valid
	Y.2	0,685		Valid
	Y.3	0,729		Valid
	Y.4	0,708		Valid
	Y.5	0,681		Valid
	Y.6	0,717		Valid
	Y.7	0,788		Valid
	Y.8	0,752		Valid
	Y.9	0,685		Valid
	Y.10	0,701		Valid
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (Z)	Z.1	0,784	0,202	Valid
	Z.2	0,826		Valid
	Z.3	0,813		Valid
	Z.4	0,778		Valid

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 26

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai r hitung lebih besar dari 0,202 sehingga disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan menggunakan teknik Cronbach's Alpha. Semakin besar nilai alpha ( $> 0,6$ ) akan semakin reliabel data tersebut. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,913	Reliabel
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,897	Reliabel
3.	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	0,813	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha dari variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan  $> 0,60$  yang berarti bahwa data yang diperoleh dari jawaban kuesioner dalam penelitian dapat diandalkan bersifat reliabel dan dapat dipercaya.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan linear antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat pada tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF), jika tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,458	2,158	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	0,458	2,158	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat nilai VIF untuk variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar  $2,158 < 10$  dan nilai toleransi sebesar  $0,458 > 0,10$  sehingga kualitas produk dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dan nilai VIF untuk variabel pengawasan kualitas laporan keuangan sebesar  $2,158 < 10$  dan nilai toleransi sebesar  $0,458 > 0,10$  sehingga harga dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Metode uji yang digunakan adalah uji heterokedastisitas Glestjer. Apabila nilai signifikansi uji Glestjer lebih dari 0,05 maka data-data penelitian bebas dari permasalahan heterokedastisitas atau perbedaan varian residual data. Apabila nilai signifikansi uji Glestjer kurang dari 0,05 maka di dalam data-data penelitian terjadi permasalahan heterokedastisitas atau perbedaan varian residual data. Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Tolerance	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,256	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	0,343	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi standar akuntansi pemerintah senilai 0,256 dan pengawasan kualitas laporan keuangan senilai 0,343. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Normalitas**

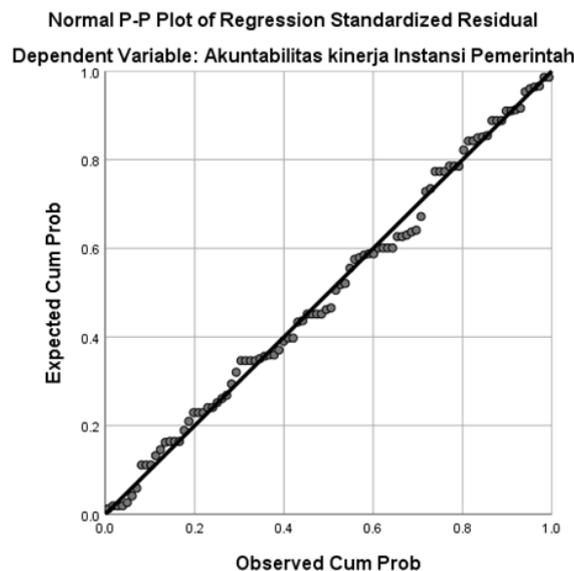
Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel yang digunakan dalam pengujian hipotesis memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji one sample *Kolmogorov-Smirnov*. Sebuah persamaan regresi dianggap memenuhi normalitas jika nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,10. Hasil pengujian ini dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Pengujian One-Sample *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,44809344
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-0,47
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-Tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 nilai tersebut berada diatas standar signifikansi yaitu 0,10. Apabila nilai signifikansi hasil uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,10 maka data dinyatakan terdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi hasil uji Kolmogorov-Sminov kurang dari 0,10 maka data dinyatakan tidak normal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal. Selain Kolmogorov-smirnov, metode menguji normalitas adalah menggunakan grafik normal dengan melihat grafik normal probability plot.



### Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil output SPSS pada Gambar 4.1 dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi penelitian ini berdistribusi normal.

#### Pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji interaksi atau biasa disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus yang sering digunakan regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2018). Variabel perkalian antara variabel bebas Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (Z) variabel moderasi, oleh karena itu menggambarkan pengaruh moderasi variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (Z) terhadap hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan (X). Hasil Pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji MRA**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,394	5,628		3,801	0,000
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,171	0,193	0,181	0,886	0,378
XZ	0,014	0,006	7,495	2,426	0,017

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang terlihat pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel moderasi XZ mempunyai t hitung sebesar 2,426 > t tabel 2,2028 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,014 dan tingkat signifikansi 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria jika nilai t-hitung < t-tabel, dan nilai signifikan > 0,05 maka koefisien regresi tidak signifikan ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan jika nilai t-hitung > t-tabel, dan nilai signifikan < 0,05 maka koefisien regresi signifikan ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil Pengujian dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji t**

Pengujian	Unstandardized B	Nilai thitung	Sig.	Standar Aturan	Kesimpulan
H <sub>1</sub> Uji t	0,604	7,931	0,000	<0,05	Diterima
H <sub>2</sub> Uji t	0,014	2,426	0,017	<0,05	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat pada tabel 4.13 Menunjukkan bahwa variabel X terhadap Y mempunyai t hitung sebesar 7,931 > t tabel 2,202 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,604 dan tingkat

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel moderasi XZ mempunyai t hitung sebesar  $2,426 > t$  tabel 2,202 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,014 dan tingkat signifikansi 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_2$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pengawasan kualitas laporan keuangan mampu memoderating variabel standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi ( $R$ ). Pada Tabel 4.8 berikut ini:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,665	0,442	0,430	3,23764

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 29

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,665. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebesar 66,5%.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien determinan ( $R^2$ ). Pada tabel 4.14 diketahui bahwa *adjusted R Square* adalah sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebesar 43% sedangkan sisanya 57% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti.

### Pembahasan

#### Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat pada tabel 4.13 Menunjukkan bahwa variabel X terhadap Y mempunyai t hitung sebesar  $7,931 > t$  tabel 2,202 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,604 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan arah yang positif yang ditunjukkan pada hasil uji yang signifikan. Standar akuntansi pemerintah memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebab adanya rangkaian-rangkaian prosedur yang tersusun dalam rangka mempertanggungjawabkan anggaran. Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintah sangat mempengaruhi perwujudan tingkat pencapaian kerja yang telah tersistematis dalam sebuah instansi. Hasil penelitian Nasution (2019) yang menguji implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa secara parsial standar akuntansi pemerintah mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai hasil penelitian Ajhar et al, (2015), dengan adanya standar akuntansi pemerintah mengakibatkan penyajian laporan keuangan pemerintah lebih akuntabel, sehingga berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating**

Berdasarkan hasil uji interaksi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan mampu memoderating pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditunjukkan pada tabel 4.13 bahwa variabel moderasi XZ mempunyai t hitung sebesar 2,426 > t tabel 2,202 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,014 dan tingkat signifikansi 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pengawasan kualitas laporan keuangan mampu memoderating variabel standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif sebagai variabel moderating dalam hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan dapat memperkuat hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas kinerja instansi

Penerapan standar akuntansi diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian, informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dipemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam Penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan studi pad Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional. Kusuma (2010) dalam Penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan SKPD kota Tasikmalaya.

Dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas maka berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawsan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Jannaini (2012) menyimpulkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan mampu memoderating pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

### **Saran**

Adapun saran setelah melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Lhokseumawe dapat memaksimalkan sistem informasi yang ada seperti website untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat menjadi sarana yang

efektif untuk mempublikasikan informasi kepada publik dan juga sebagai wadah menampung aspirasi publik.

2. Penelitian ini masih perlu dikaji lebih mendalam mengenai variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang terkait dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel Moderating pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan juga meneliti faktor-faktor lain dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- Ajhar., Akram., Endar, P. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akruak dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Mataram*, 3(1), 62-73
- Arjuna., Putri, A. M (2019). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Performance Accountability Of Local Government Institutions. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*.
- Darma, D. A. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruak dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah . *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. 9 (2)
- Erwinton, P, A, T (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 17 (1)
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. 4 (1). 1-16
- Jannaini, Y. (2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruak dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 30-43.
- Nurasratunnisa, Y., Sambo, E.M., Sufiati, Wiyana, A. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 9 (2)
- Reyhan, H, F. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat). *JOM Fekon*. 4(1). 11-22.
- Santoso, U, (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis FISIP Unpar*. 4 (1). 14-33.